Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pemerintahan Shah Jahan Begum di Bhopal, India 1868-1901 M : Kajian Historis Melalui Karya *Taj-ul-Iqbal*

Viona Aurillia Putri
UIN Sunan Ampel Surabaya
Penulis Korespondensi: vionaviona182018@gmail.com
Rochimah
UIN Sunan Ampel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas pemerintahan Shah Jahan Begum di Bhopal, India, pada periode 1868-1901 M dengan menggunakan *Taj-ul-Iqbal* sebagai sumber utama. Permasalahan penelitian berfokus pada kondisi pemerintahan dan kehidupan sosial-politik Bhopal, kebijakan Shah Jahan Begum dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan masyarakat Bhopal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Shah Jahan Begum serta mengidentifikasi bentuk kebijakan dan kontribusinya terhadap perkembangan Bhopal dan kemajuan masyarakatnya pada akhir abad ke-19 M. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Karya *Taj-ul-Iqbal* digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peran dan pemikiran Shah Jahan Begum, kemudian dianalisis bersama sumber-sumber pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Shah Jahan Begum ditandai oleh upaya pembaruan dalam bidang pendidikan, bidang politik, dan kehidupan keagamaan masyarakat di Bhopal, India. Kebijakan tersebut menunjukkan peran Shah Jahan Begum sebagai penguasa perempuan Muslim dalam mengelola dan mengembangkan Bhopal di tengah perubahan sosial-politik pada masa kolonial India.

Kata Kunci: *shah jahan begum, bhopal, india, pemerintahan, taj ul iqbal, kebijakan,*

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam pemerintahan dan pembaharuan sosial pada dunia Islam kolonial merupakan persoalan penting yang perlu terus dikaji. Salah satu tokoh yang menarik untuk diteliti adalah Shah Jahan Begum, penguasa perempuan Muslim yang memerintah negara kerajaan Bhopal di India Tengah pada periode 1868-1901 M. Kepemimpinannya berlangsung dalam situasi India kolonial yang menghadapi perubahan sosial, politik, dan keagamaan akibat penetrasi kekuasaan Britania serta berkembangnya gerakan pembaruan Islam. Dalam konteks tersebut, Bhopal memiliki kedudukan yang khas dalam sejarah India kolonial karena wilayah ini diperintah oleh para penguasa perempuan secara berkesinambungan sepanjang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 M. Kondisi tersebut menjadikan Bhopal bukan hanya sebuah kerajaan Muslim di

bawah pengawasan Britania, tetapi juga ruang politik tempat perempuan memperoleh kesempatan untuk menjalankan otoritas pemerintahan secara nyata (Lambert-Hurley, 2007: 5).

Shah Jahan Begum bukan hanya figur politik, tetapi juga pelindung pembaharuan pendidikan dan kehidupan keagamaan. Kebijakan yang dijalankannya menunjukkan upaya menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan modernisasi masyarakat Bhopal. Ia dikenal memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, kesehatan, pemukiman, teknologi, serta pembangunan sarana keagamaan (Singh, 2020: 42-45). Dengan demikian, kepemimpinan Shah Jahan Begum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai simbol kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan. Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakannya turut memengaruhi jalannya perubahan sosial di Bhopal. Oleh sebab itu, pemerintahannya perlu dipahami sebagai bagian dari proses terbentuknya masyarakat Muslim modern di India pada akhir abad ke-19 M.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana peran Shah Jahan Begum dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan serta keagamaan, dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada perkembangan masyarakat Bhopal pada akhir abad ke-19 M. Pemilihan kedua ranah tersebut penting karena keduanya berkaitan erat dengan proses perubahan masyarakat Muslim. Melalui kajian pendidikan dan keagamaan, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara kekuasaan politik, legitimasi keagamaan, dan transformasi sosial dalam sebuah kerajaan Muslim yang berada di bawah dominasi kolonial Britania. Kajian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa kerajaan Bhopal tidak hanya menjadi objek politik kolonial, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan internal masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Shah Jahan Begum sebagai penguasa perempuan Muslim serta mengidentifikasi bentuk kebijakan dan kontribusinya terhadap kemajuan Bhopal. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep *agency* atau kemampuan bertindak. Konsep tersebut digunakan untuk memahami posisi Shah Jahan Begum sebagai subjek sejarah yang tidak hanya menerima struktur kolonial dan norma sosial yang ada, tetapi juga memanfaatkannya untuk mendorong perubahan. Dalam kajian perempuan Muslim Bhopal, pembaruan sering dilakukan melalui pemanfaatan kerangka Islam dan norma tradisional, sehingga perubahan sosial berlangsung secara bertahap tanpa memutus kontinuitas nilai keagamaan (Lambert-Hurley, 2007: 5-6).

Sumber utama penelitian ini adalah *Taj-ul-Iqbal* atau *Tārīkh-i Bhopal*, sebuah karya sejarah yang ditulis oleh Shah Jahan Begum sendiri. Karya ini memuat informasi mengenai sejarah Bhopal, pemikiran penguasa, serta kegiatan pemerintahan pada masanya. Penggunaan *Taj-ul-Iqbal* penting karena memungkinkan peneliti membaca pandangan Shah Jahan Begum dari sudut pandangnya sendiri. Namun, karena karya tersebut ditulis oleh penguasa, sumber ini perlu dikritisi dan dibandingkan dengan sumber pendukung seperti arsip kolonial, literatur akademik, serta kajian sejarah Bhopal agar diperoleh gambaran yang lebih objektif.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan melalui pengumpulan *Taj-ul-Iqbal* dan sumber pendukung yang relevan. Kritik sumber digunakan untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan keterbatasan informasi dalam sumber tersebut. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis kebijakan pendidikan dan keagamaan Shah Jahan Begum dalam konteks sosial-politik Bhopal. Selanjutnya, historiografi digunakan untuk menyusun temuan secara naratif dan analitis.

Beberapa studi terdahulu telah membahas tokoh dan dinasti Begum Bhopal. Siobhan Lambert-Hurley meneliti peran penguasa perempuan Bhopal dalam gerakan pembaruan perempuan Muslim, khususnya Sultan Jahan Begum yang memerintah setelah Shah Jahan Begum. Penelitian lain juga menyoroti kemunculan perempuan Muslim Bhopal sebagai aktor politik dan sosial pada awal abad ke-20. Sementara itu, kajian tentang kekuasaan Islam di India kolonial menempatkan Bhopal sebagai contoh negara kerajaan Muslim yang memiliki otonomi internal tertentu di bawah supremasi Britania (Metcalf, 2011: 1–30).

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus dan sumber utama yang digunakan. Jika sebagian penelitian lebih menekankan Sultan Jahan Begum atau gerakan perempuan Muslim pada awal abad ke-20 M, penelitian ini berfokus pada Shah Jahan Begum pada periode 1868-1901 M. Selain itu, penelitian ini menempatkan *Taj-ul-Iqbal* sebagai sumber utama untuk menelusuri pemikiran dan kebijakan Shah Jahan Begum, khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi baru bagi kajian sejarah perempuan Muslim, pembaharuan pendidikan, dan kekuasaan lokal di India kolonial.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya menampilkan Shah Jahan Begum bukan hanya sebagai penguasa perempuan, tetapi sebagai aktor pembaharuan

yang berpengaruh terhadap masyarakat Bhopal. Temuan penelitian diharapkan memperkaya kajian sejarah peradaban Islam, khususnya mengenai relasi antara gender, kekuasaan, pendidikan, dan keagamaan. Pada akhirnya, penelitian ini akan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan keagamaan Shah Jahan Begum merupakan bentuk kontribusi seorang penguasa perempuan Muslim dalam mengembangkan Bhopal di tengah perubahan sosial-politik masa kolonial India (Metcalf, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Kedudukan Shah Jahan Begum

Shah Jahan Begum lahir pada 29 Juli 1838 di Islamnagar, dekat Bhopal, dan wafat pada 16 Juni 1901. Ia merupakan putri Sikandar Begum, penguasa Bhopal yang memerintah pada 1860-1868. Kedudukan Shah Jahan Begum sebagai pewaris takhta tidak dapat dipisahkan dari tradisi politik Bhopal yang sejak awal abad ke-19 M memberikan ruang bagi perempuan untuk memegang kekuasaan. Dalam keluarga tersebut, kepemimpinan perempuan menjadi bagian dari legitimasi dinasti dan tata kelola Kesultanan Bhopal (Lambert-Hurley, 2007: 5-6).

Pendidikan Shah Jahan Begum dibentuk dalam lingkungan istana yang menekankan pengetahuan keislaman, bahasa Urdu dan Persia, sastra, administrasi, serta keterampilan memerintah. Sebagai calon penguasa, ia dibesarkan untuk memahami urusan negara dan tradisi pemerintahan Bhopal. Dalam *Taj-ul-Iqbal*, perhatian terhadap pendidikan dan pengetahuan tampak sebagai bagian dari visi pemerintahan yang dijalankannya. Karya tersebut tidak hanya memuat sejarah Bhopal, tetapi juga menunjukkan bahwa Shah Jahan Begum memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan masyarakat yang berpengetahuan dan bermartabat (Begum, 1876: 121).

Keluarga Shah Jahan Begum berperan penting dalam kontinuitas kekuasaan Bhopal. Ia adalah cucu Qudsia Begum dan putri Sikandar Begum. Setelah wafat, ia digantikan oleh putrinya, Sultan Jahan Begum. Rangkaian ini menunjukkan bahwa Bhopal diperintah oleh empat generasi penguasa perempuan Muslim dari 1819 hingga 1926. Dalam kerangka sejarah perempuan dan Islam, keluarga tersebut bukan hanya keluarga penguasa, tetapi juga jaringan yang memproduksi otoritas politik, keagamaan, dan pendidikan (Lambert-Hurley et al., 2023: 134-152).

Shah Jahan Begum memerintah Bhopal dalam dua periode. Periode pertama berlangsung pada 1844-1860, ketika ia naik takhta sebagai anak-anak dan ibunya,

Sikandar Begum, menjalankan pemerintahan sebagai wali. Pada masa ini, kekuasaan formal berada pada Shah Jahan Begum, tetapi otoritas administratif dan politik efektif dipegang oleh Sikandar Begum. Periode kedua berlangsung pada 1868–1901, setelah Sikandar Begum wafat. Pada periode kedua inilah Shah Jahan Begum menjalankan pemerintahan secara langsung dan mengembangkan kebijakan pendidikan, keagamaan, administrasi, serta pembangunan publik (Lambert-Hurley, 2007: 5-6; Bhopal District Administration, 2019).



Gambar 1 : Potret Nawab Sultan Shah Jahan Begum (1838-1901), penguasa Bhopal, dalam foto studio karya Bourne & Shepherd, Kolkata, sekitar tahun 1872.

Potret Nawab Sultan Shah Jahan Begum (1838-1901), penguasa Bhopal, dalam foto studio karya Bourne & Shepherd, Kolkata, sekitar tahun 1872. Foto berformat carte de visite ini menampilkan Shah Jahan Begum memakai mahkota, perhiasan, dan tanda kehormatan Order of the Star of India (GCSI), yang dianugerahkan kepadanya pada 1872. Potret ini merekam posisinya sebagai penguasa perempuan Muslim yang berkuasa atas negara kerajaan Bhopal di bawah protektorat Inggris, sekaligus menjadi bagian dari tradisi fotografi kolonial yang memvisualisasikan penguasa pribumi India. Sumber foto: British Library, Photo 127: Album of cartes de visite portraits of Indian rulers and notables.

Foto ini menjadi kontroversial karena sering disebarkan di media sosial dengan klaim keliru bahwa tokoh dalam gambar adalah Mumtaz Mahal (Arjumand Banu Begum), istri Kaisar Mughal Shah Jahan dan tokoh yang memaknai pembangunan Taj Mahal. Klaim tersebut tidak dapat benar secara kronologis maupun teknis: Mumtaz Mahal wafat pada 1631, sedangkan fotografi baru berkembang pada abad ke-19; foto ini dibuat sekitar 1872, lebih dari dua abad setelah kematian Mumtaz Mahal.

Naiknya Shah Jahan Begum ke Takhta

Kenaikan Shah Jahan Begum sebagai sultan Bhopal tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya sebagai putri Sikandar Begum, tetapi juga oleh dinamika suksesi dan pengakuan politik pemerintah kolonial Britania. Ia pertama kali diakui sebagai penguasa pada 1844, tetapi karena masih kanak-kanak, kekuasaan efektif dijalankan oleh Sikandar Begum sebagai wali (Khan, 2000; The Imperial Durbar Album, 1911).

Pada tahun 1844-1860 disini terjadimasa perwalian dimana, setelah wafatnya Nawab Jahangir Muhammad Khan pada 1844, Shah Jahan Begum diangkat sebagai penguasa Bhopal meskipun ia baru berusia enam tahun. Dalam kondisi tersebut, kedudukan politiknya bersifat formal, sedangkan urusan pemerintahan, administrasi, dan pengambilan keputusan dijalankan oleh ibunya, Sikandar Begum, sebagai wali.

Masa perwalian ini penting karena menunjukkan bahwa kelangsungan kekuasaan Bhopal tidak semata-mata bergantung pada hak waris, tetapi juga pada kemampuan keluarga penguasa menjaga stabilitas pemerintahan. Sikandar Begum tidak hanya menjadi wali bagi putrinya, tetapi juga membangun dasar administratif yang kelak diteruskan oleh Shah Jahan Begum ketika memerintah secara mandiri.

Pada 1860, pemerintah Britania mengakui Sikandar Begum sebagai penguasa Bhopal atas namanya sendiri. Akibatnya, posisi Shah Jahan Begum berubah dari penguasa formal menjadi pewaris takhta, sementara kekuasaan efektif tetap berada di tangan ibunya

Shah Jahan Begum memperoleh kekuasaan penuh setelah Sikandar Begum wafat pada 1868. Pada saat itu, ia dilantik kembali sebagai penguasa Bhopal atau Ruling Chief, sedangkan putrinya, Sultan Jahan Begum, ditetapkan sebagai pewaris. Pelantikan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Shah Jahan Begum sebagai sultan tidak hanya bertumpu pada hak dinastis, tetapi juga pada pengakuan Britania. Dalam sistem paramountcy, Bhopal tetap memiliki otonomi internal, tetapi keputusan yang berkaitan dengan

kedaulatan, pertahanan, dan hubungan luar negeri memerlukan pertimbangan pemerintah kolonial (Metcalf, 2011).

Kenaikan Shah Jahan Begum pada 1868 menandai berakhirnya masa perwalian Sikandar Begum dan dimulainya pemerintahan langsung Shah Jahan Begum hingga 1901. Pada periode ini, ia tidak lagi hanya menjadi figur formal, melainkan aktif menjalankan kebijakan pemerintahan dalam berbagai bidang (Lambert-Hurley, 2007).

Dengan demikian, Shah Jahan Begum naik tahta bukan semata-mata karena status sebagai putri penguasa sebelumnya. Ia berhasil menjadi sultan karena memenuhi tiga unsur penting, yaitu hak waris dalam dinasti Begum, pembentukan politik dan administratif sejak masa kanak-kanak, serta pengakuan politik dari Britania yang mengawasi kesultanan Bhopal.

Bhopal dan Supremasi Kolonial Britania

Bhopal terletak di India Tengah dan saat ini merupakan ibu kota negara bagian Madhya Pradesh, India. Pada masa Shah Jahan Begum, Bhopal merupakan ibu kota Kesultanan Bhopal sekaligus pusat pemerintahan, keagamaan, dan kebudayaan masyarakat Muslim. Kedudukan geografis tersebut menjadikan Bhopal sebagai wilayah penting dalam jaringan politik dan ekonomi India kolonial (Bhopal District Administration, 2019; Metcalf, 2011: 1-30).

Hubungan Bhopal dengan Britania berubah menjadi supremasi kolonial setelah Perang Inggris-Maratha. Melalui perjanjian pada 1818, Bhopal menerima perlindungan Britania dan masuk ke dalam sistem *paramountcy*. Dalam sistem tersebut, Kesultanan Bhopal tetap memiliki pemerintahan internal, tetapi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan hubungan dengan negara kerajaan lain berada di bawah kendali Britania. Dengan kata lain, Bhopal bukan koloni langsung, melainkan negara kerajaan yang otonomi internalnya dibatasi oleh kekuasaan tertinggi Britania (Metcalf, 2011: 1-30).

Pengawasan Britania atas Bhopal dijalankan melalui pejabat politik yang dikenal sebagai *Political Agent* atau *Resident*. Pejabat tersebut bertugas mewakili Pemerintah Britania dan mengawasi hubungan Kesultanan Bhopal dengan pemerintah kolonial. Dalam praktiknya, pejabat ini menjadi penghubung antara Shah Jahan Begum dan pemerintah kolonial Britania, khususnya dalam urusan suksesi, keamanan, perbatasan, dan kebijakan luar. Identitas pejabat pengawas berubah sepanjang masa pemerintahan Shah Jahan Begum karena penugasan pejabat kolonial bersifat berkala.

Dalam *Taj-ul-Iqbal*, relasi Shah Jahan Begum dengan pejabat Britania dapat dibaca sebagai relasi yang tidak sepenuhnya setara. Shah Jahan Begum memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dalam negeri, tetapi keputusan besar yang menyangkut kedaulatan dan keamanan tetap memerlukan pertimbangan pihak Britania. Kondisi ini membentuk ruang bertindak yang terbatas, tetapi tidak menghilangkan kemampuan Shah Jahan Begum untuk menjalankan kebijakan pembaharuan. Ia memanfaatkan otonomi internal tersebut untuk memperkuat administrasi, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan masyarakat Bhopal (Begum, 1876: 133;144)

Kondisi Pemerintahan dan Kehidupan Sosial-Politik Bhopal

Pemerintahan Shah Jahan Begum pada 1868-1901 berlangsung dalam situasi peralihan dari pemerintahan kerajaan tradisional menuju administrasi yang lebih modern. Bhopal harus menata ulang sistem pendapatan negara, administrasi daerah, peradilan, dan pelayanan publik agar mampu menghadapi tuntutan zaman kolonial. Dalam konteks ini, Shah Jahan Begum tidak hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai Begum, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Secara sosial-politik, masyarakat Bhopal menghadapi perubahan akibat berkembangnya transportasi, sistem pos, layanan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan modern. Perubahan tersebut menciptakan tuntutan baru terhadap negara untuk menyediakan layanan yang lebih luas. Shah Jahan Begum merespons tuntutan tersebut dengan memperkuat kelembagaan pemerintahan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahannya bersifat adaptif terhadap perubahan sosial-politik masa kolonial.

Temuan ini dapat ditafsirkan melalui konsep *agency* atau kemampuan bertindak. Shah Jahan Begum tidak hanya menerima struktur kolonial dan norma sosial yang berlaku, tetapi juga memanfaatkan posisi, sumber daya, dan legitimasi keagamaannya untuk mendorong perubahan. Ia menjadikan pendidikan dan kehidupan keagamaan sebagai bidang utama pembaharuan karena kedua bidang tersebut paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dan identitas Kesultanan Bhopal (Lambert-Hurley, 2007: 5-6).

Kebijakan Shah Jahan Begum dalam Bidang Pendidikan dan Keagamaan dalam *Taj-ul-Iqbal*

Kebijakan Shah Jahan Begum dalam bidang pendidikan dan keagamaan mencerminkan upaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan sekaligus memodernisasi Kesultanan Bhopal. Dalam *Taj-ul-Iqbal Tarikh Bhopal*, Shah Jahan Begum tidak hanya menyajikan kronologi politik Bhopal, tetapi juga menampilkan dirinya sebagai penguasa yang berkomitmen terhadap penyebaran ilmu, pembinaan moral keagamaan, dan pelestarian identitas Islam (Begum, 1876: 233). *Taj-ul-Iqbal* penting sebagai sumber sejarah karena ditulis oleh penguasa sendiri, sehingga memungkinkan peneliti melihat bagaimana kebijakan negara diposisikan sebagai bagian dari misi peradaban.

a. Kebijakan di Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Shah Jahan Begum. Dalam *Taj-ul-Iqbal*, penekanan pada ilmu dan pembinaan generasi muda diposisikan sebagai fondasi kemajuan negara. Shah Jahan Begum memandang bahwa kekuatan sebuah kesultanan tidak hanya ditentukan oleh tentara, pendapatan negara, atau hubungan dengan Inggris, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya (Begum, 1876: 228; 233). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Bhopal berkembang dalam dua arah, yaitu pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang menonjol adalah pembangunan sekolah di Kota Bhopal. Dalam *Taj-ul-Iqbal*, Shah Jahan Begum mengembangkan lembaga pendidikan di Bhopal melalui Prince of Wales School, Sulemania College, dan Victoria School. Ketiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikannya tidak hanya berorientasi pada pendidikan umum dan keagamaan, tetapi juga pada pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat. Prince of Wales School, yang secara eksplisit disebut sebagai bangunan yang dibangun Shah Jahan Begum, memberikan pendidikan keterampilan bagi anak laki-laki. Siswa diajarkan keterampilan tenun kain durry, pembuatan tikar, sulaman kain muslin, pembuatan tenda, merajut, menjahit, pembuatan sandal wol, serta penyepuhan dan pelapisan perak. Pelatihan tersebut diarahkan agar siswa memiliki kemampuan kerja yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sulemania College memberikan pendidikan yang lebih luas, mencakup bahasa Arab, Persia, matematika, Urdu, Hindi, Nagari, dan bahasa Inggris. Selain pelajaran formal, lembaga ini juga memiliki perpustakaan yang memuat buku-buku ilmiah, keagamaan, dan sastra. Pendidikan di Sulemania College bertujuan membentuk

siswa yang menguasai pengetahuan umum, keagamaan, dan bahasa, sehingga dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja di pemerintahan (Begum, 1876: 193). Sementara itu, Victoria School ditujukan bagi anak yatim. Siswa diajarkan keterampilan kerajinan seperti pembuatan renda emas dan perak, sulaman, tenun selendang, serta pembuatan sepatu. Selain memperoleh pelatihan keterampilan, anak-anak juga mendapatkan pakaian dan makanan dari biaya negara. Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus bekal keterampilan bagi anak yatim agar dapat hidup lebih mandiri (Begum, 1876: 194).

Dengan demikian, ketiga sekolah tersebut memperlihatkan arah kebijakan pendidikan Shah Jahan Begum yang menggabungkan pendidikan keagamaan, bahasa, pengetahuan umum, dan keterampilan kerja. Prince of Wales School menekankan keterampilan teknis, Sulemania College menekankan pendidikan umum dan keagamaan, sedangkan Victoria School memberikan perlindungan serta pelatihan kerja bagi anak yatim (Begum, 1876: 193-194, 227).

Selain itu, Bhopal District Administration mencatat perkembangan lembaga pendidikan pada masa dinasti Begum, termasuk *Sultania Girl's School* dan *Alexandria Noble School* yang kemudian dikenal sebagai *Hamidia High School*. Kehadiran lembaga tersebut memperlihatkan perhatian pemerintahan Bhopal terhadap pendidikan formal dan pendidikan perempuan (Bhopal District Administration, 2019). Perhatian terhadap pendidikan perempuan merupakan ciri khas pemerintahan dinasti Begum Bhopal. Shah Jahan Begum melanjutkan tradisi pendidikan perempuan yang telah dirintis oleh pendahulunya, terutama Sikandar Begum. Kajian dalam *History Workshop Journal* menunjukkan bahwa Shah Jahan Begum memiliki ruang untuk menjalankan proyek sosial dan keagamaan, khususnya dalam bidang pendidikan perempuan dan kesehatan. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa Shah Jahan Begum mendirikan dan mensponsori sekolah bagi perempuan Bhopal, perpustakaan, museum, serta klub perempuan (Lambert-Hurley, 2023).

Dalam kerangka *Taj-ul-Iqbal*, kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai wujud cita-cita pemerintahan yang beradab. Shah Jahan Begum menempatkan pendidikan bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan instrumen pembentukan masyarakat yang berpengetahuan dan berakhlak. Ia menyatakan bahwa pada masa pemerintahannya, orang-orang berilmu, berkapasitas, berakhlak baik, setia, jujur, dan cakap memperoleh penghormatan sesuai kedudukannya (Begum, 1876: 228). Pendidikan keagamaan diberi posisi penting karena dianggap mampu menjaga identitas Islam masyarakat Bhopal,

sementara pendidikan umum diperlukan untuk menyiapkan aparatur negara dan kelompok elite yang mampu mengelola administrasi modern. Dukungan terhadap lembaga pendidikan juga tampak dari pengembangan madrasah dan sekolah keagamaan. *Taj-ul-Iqbal* menunjukkan bahwa Shah Jahan Begum memberikan penghargaan kepada tokoh keilmuan dan pejabat yang cakap, antara lain Kazi Zainalabdin, Mufti Syud Abdalla, dan Maulavi Abdul Karim. Ia juga menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya pengetahuan disebarluaskan dan agama yang benar diajarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam pemerintahan Shah Jahan Begum memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai sarana peningkatan kompetensi masyarakat dan sebagai media pelestarian nilai-nilai Islam.

Kebijakan pendidikan Shah Jahan Begum juga berkaitan dengan rekrutmen pegawai negeri. Kebijakan mewajibkan sertifikat pendidikan bagi calon pegawai telah diperkenalkan pada masa Sikandar Begum pada tahun 1871, tetapi budaya administratif tersebut terus berpengaruh pada masa pemerintahan Shah Jahan Begum (Indian Culture Portal, 2019). Dalam praktiknya, syarat pendidikan bagi pegawai mendorong keluarga bangsawan dan masyarakat kota untuk mengirim anak-anaknya ke sekolah. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu jalur mobilitas sosial sekaligus sarana pembentukan birokrasi yang lebih profesional.

b. Kebijakan di Bidang Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, Shah Jahan Begum memperlihatkan diri sebagai pelindung Islam sekaligus penguasa yang relatif toleran terhadap keragaman masyarakat Bhopal. *Taj-ul-Iqbal* menonjolkan peran Shah Jahan Begum dalam memajukan urusan agama, terutama melalui pembangunan sarana ibadah, dukungan terhadap tokoh keilmuan, serta pengembangan lembaga pendidikan Islam (Begum, 1876: 227-228; 233). Sikap tersebut bukan hanya ekspresi kesalehan pribadi, tetapi juga strategi politik untuk memperkuat legitimasi sebagai penguasa Muslim.

Dalam *Taj-ul-Iqbal*, Shah Jahan Begum mencatat bahwa Kota Bhopal memiliki lebih dari seratus masjid dari batu dan bata. Ia juga menyebut Jama Masjid yang dibangun Nawab Qudsia Begum serta Moti Masjid yang dibangun Sikandar Begum. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan keagamaan merupakan bagian dari lanskap kota Bhopal yang terus dikembangkan oleh dinasti Begum (Begum, 1876: 227). Dalam konteks pemerintahan Shah Jahan Begum, keberadaan masjid, sekolah, dan

lembaga keilmuan menunjukkan keterpaduan antara pembangunan fisik, pendidikan, dan kehidupan keagamaan.

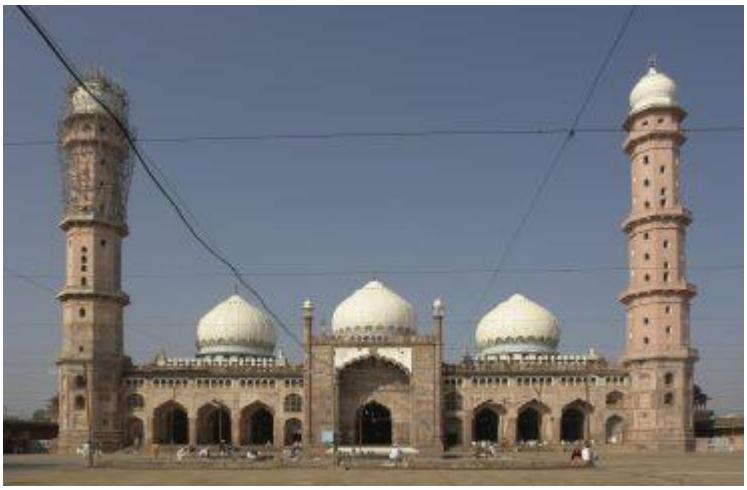
Shah Jahan Begum juga memberikan perhatian kepada ulama dan lembaga keagamaan. *Taj-ul-Iqbal* menyebut sejumlah tokoh keilmuan dan pejabat negara yang dihormati pada masanya, antara lain Kazi Zainalabdin, Mufti Syud Abdalla, dan Maulavi Abdul Karim. Shah Jahan Begum menyatakan bahwa pada masa pemerintahannya, pengetahuan disebarluaskan dan agama yang benar diajarkan kepada masyarakat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan keagamaannya tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan keilmuan Islam dan moralitas masyarakat.

Namun, kebijakan keagamaan Shah Jahan Begum tidak dapat dipisahkan dari konteks politik kolonial. Bhopal merupakan negara kerajaan yang berada di bawah sistem *subsidiary alliance* dengan Inggris. *Taj-ul-Iqbal* menyebut Bhopal sebagai salah satu negara Muslim terbesar di India Britania yang diperintah dalam kerangka hubungan dengan kekuasaan kolonial (Royal Collection Trust, 1999). Dalam situasi tersebut, kebijakan keagamaan juga berfungsi sebagai sarana menjaga otonomi budaya. Dengan memperkuat institusi Islam, Shah Jahan Begum berusaha menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus berarti hilangnya identitas keagamaan.

Ketegangan antara reformisme Islam dan politik kolonial juga muncul melalui figur suami Shah Jahan Begum, Nawab Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam gerakan cetak dan pembaruan keagamaan. Kajian dalam *Journal of the Royal Asiatic Society* mengkaji perannya dalam dunia cetak pada akhir abad ke-19 M. Meskipun Siddiq Hasan Khan bukan penguasa resmi Bhopal, pengaruhnya terhadap lingkungan keagamaan istana turut membentuk atmosfer kebijakan keagamaan pada masa Shah Jahan Begum.

Di sisi lain, Shah Jahan Begum juga dikenal menjalankan kebijakan yang melindungi masyarakat non-Muslim. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia mengeluarkan aturan khusus untuk perlindungan umat Hindu di Bhopal dan membentuk *Hindu Property Trust* guna menjaga properti masyarakat Hindu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penguatan kehidupan Islam tidak disertai diskriminasi terhadap kelompok agama lain. Dalam kerangka *Taj-ul-Iqbal*, sikap tersebut dapat dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa keadilan penguasa harus mencakup seluruh rakyat, bukan hanya kelompok yang seagama.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan keagamaan Shah Jahan Begum dalam *Taj-ul-Iqbal* memiliki pola yang saling berkaitan. Pendidikan digunakan untuk mencetak masyarakat yang berpengetahuan, sementara kebijakan keagamaan digunakan untuk membentuk moralitas kolektif dan memperkuat identitas kesultanan. Keduanya menjadi bagian dari proyek pembangunan Bhopal sebagai negara Islam yang modern, tertib, dan mampu bertahan dalam tatanan kolonial.



Gambar 2 : Taj-ul-Masajid https://bhopal.nic.in/en/tourist-place/taj-ul-masajid/

Taj-ul-Masajid merupakan salah satu warisan pembangunan keagamaan yang dirintis oleh Shah Jahan Begum di Bhopal. Pembangunan masjid ini dimulai pada masa pemerintahannya dan dilanjutkan oleh putrinya, Sultan Jahan Begum, sebelum akhirnya diselesaikan pada 1985. Keberadaan masjid tersebut memperlihatkan peran istana dalam mendukung kehidupan keagamaan Islam serta memperkuat posisi Bhopal sebagai pusat keagamaan dan keilmuan Muslim (Bhopal District Administration).

c. Kebijakan di Bidang Politik

Dalam bidang politik, pemerintahan Sultan Shah Jahan Begum yang dimulai pada 1868 menandai upaya memperkokoh kedudukan dinasti perempuan Bhopal sekaligus menata ulang pemerintahan internal. Ia memperoleh pengakuan sebagai penguasa melalui pelantikan resmi, sementara putrinya, Sultan Jahan Begum, ditetapkan sebagai pewaris. Langkah tersebut menegaskan haknya untuk memerintah dan mengurangi ketidakpastian pergantian kekuasaan. Namun, pelantikan itu tetap melibatkan pejabat Inggris, sehingga legitimasinya bertumpu pada hak dinasti sekaligus dukungan pemerintah kolonial (Begum, 1876 : 122-126).

Dalam hubungan dengan Inggris, Shah Jahan Begum memilih jalur loyalitas untuk menjaga keberlangsungan Bhopal. Ia menyatakan akan melanjutkan kesetiaan

kepada pemerintah Inggris dan memperbaiki kondisi rakyat. Pada saat yang sama, ia berusaha memperbaiki cara berkomunikasi dengan pemerintah kolonial. Pada 1872, ia memperoleh persetujuan agar surat kepada Gubernur Jenderal tidak lagi ditulis dalam bentuk permohonan, melainkan dalam bentuk surat resmi. Perubahan ini menunjukkan usahanya mempertahankan martabat sebagai penguasa dalam relasi yang tidak setara (Begum, 1876: 138, 172-173). Posisi tersebut sejalan dengan gambaran Metcalf bahwa Bhopal memperoleh dukungan dan otonomi internal dari Inggris dengan imbalan loyalitas politik.

Kebijakan internalnya lebih banyak diarahkan pada pengawasan pejabat dan pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui kunjungan ke wilayah selatan, barat, dan timur Bhopal, ia mendengar pengaduan rakyat, memeriksa pejabat, serta meninjau masalah pendapatan dan pengukuran tanah. Ia juga memerintahkan penindakan terhadap suap, pungutan yang tidak disahkan negara, dan penindasan oleh pejabat daerah. Kebijakan ini melindungi rakyat, tetapi sekaligus memperkuat kendali penguasa atas perantara kekuasaan di daerah. Penertiban tersebut diikuti pembaruan peradilan. Shah Jahan Begum memerintahkan penyelesaian perkara yang menumpuk, memperluas kewenangan pejabat berjenjang, serta menetapkan batas waktu penyelesaian perkara pidana, pendapatan, dan perdata. Kepala departemen juga diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala, sedangkan pejabat yang lalai dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, pemerintahan Bhopal mulai mengembangkan aturan yang lebih jelas mengenai kewenangan, tenggat kerja, dan penilaian pejabat (Begum, 1876:146-147). Reformasi peradilan ini berada dalam kesinambungan dengan pembaharuan sistem pendapatan dan peradilan yang telah dirintis pada masa Sikandar Begum (Lambert-Hurley, 2023:1-23).

Bidang fiskal dan agraria juga menjadi perhatiannya. Ia menata utang negara dan memeriksa pengeluaran penguasa, menghapus pajak atas bahan pangan yang dibawa ke kota Bhopal, serta memperbarui pengukuran tanah dengan metode survei baru. Klasifikasi tanah disederhanakan dan penilaian pendapatan disesuaikan dengan kondisi lahan. Tujuannya bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga mengurangi kesewenang-wenangan pemungutan yang dirasakan petani (Shah Jahan Begum, 1876: 143-144). Dalam kerangka pemerintahan negara kerajaan, pengelolaan pendapatan memiliki fungsi politik penting karena menjadi dasar bagi penguasa untuk membiayai administrasi, pembangunan, dan kegiatan patronase.

Shah Jahan Begum juga mengembangkan perangkat pemerintahan melalui modernisasi militer, pengelolaan hutan, dan perluasan layanan pos. Ia memperbaiki organisasi pasukan, membentuk artileri berkuda, membangun arsenal, serta mengatur hutan Gunnur melalui survei dan departemen kehutanan. Layanan pos kemudian diperluas untuk kepentingan pejabat maupun masyarakat. Langkah-langkah ini memperlihatkan upaya menambah kemampuan negara dalam mengelola wilayah, sumber daya, dan komunikasi.

Secara keseluruhan, kebijakan politik Shah Jahan Begum dapat dibaca sebagai usaha konsolidasi kekuasaan. Ia mempertahankan legitimasi dinasti, menjaga hubungan dengan Inggris, menertibkan birokrasi, memperbaiki peradilan, dan memperluas kapasitas pemerintahan. Meskipun banyak kebijakan tersebut dijalankan dalam kerangka kekuasaan kolonial, pemerintahannya menunjukkan bahwa Bhopal tetap memiliki ruang untuk menata administrasi internal dan memperjuangkan penghormatan atas kedudukan penguasanya. Metcalf menegaskan bahwa para penguasa Bhopal bergerak dalam ruang otonomi yang diberikan Inggris selama pemerintahan mereka dianggap tertib dan dapat diterima. Lambert-Hurley juga menunjukkan bahwa kebijakan para Begum Bhopal berkembang melalui keseimbangan antara kepentingan rakyat, elite pemerintahan, dan tuntutan kekuasaan kolonial.

Dampak Kebijakan Shah Jahan Begum terhadap Masyarakat dan Kesultanan Bhopal, 1868-1901

Kebijakan Shah Jahan Begum memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan masyarakat dan kesultanan Bhopal pada periode 1868–1901. Dampak tersebut tampak dalam bidang pendidikan, kehidupan keagamaan, pembangunan kota, administrasi negara, serta posisi Bhopal dalam tatanan politik India kolonial. *Taj-ul-Iqbal* menjadi sumber utama untuk melihat bagaimana dampak tersebut direkam oleh penguasa sendiri, meskipun teks ini perlu dibaca secara kritis karena juga berfungsi sebagai narasi legitimasi kekuasaan.

a. Dampak terhadap Perkembangan Pendidikan

Dampak paling nyata dari kebijakan pendidikan adalah meluasnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal. Dalam *Taj-ul-Iqbal*, Shah Jahan Begum menyebutkan pembangunan *Sulemania School*, *Victoria School*, dan *Prince of*

Wales School di Kota Bhopal. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut memperluas sarana pendidikan formal dan memperkuat posisi Bhopal sebagai pusat kegiatan pendidikan.

Bagi perempuan, dampak kebijakan ini sangat penting. Shah Jahan Begum mendirikan dan mensponsori sekolah bagi perempuan serta mendukung keberadaan perpustakaan, museum, dan klub perempuan (Lambert-Hurley, 2023). Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menciptakan ruang sosial baru bagi perempuan Bhopal. Mereka tidak lagi hanya berperan dalam lingkup domestik, tetapi mulai memperoleh akses terhadap pengetahuan, kegiatan sosial, dan aspirasi publik. Dalam jangka panjang, kebijakan ini meletakkan dasar bagi perkembangan pendidikan perempuan pada masa penerusnya, Sultan Jahan Begum.

Pendidikan juga memengaruhi birokrasi Bhopal. Semakin banyak orang yang memperoleh pendidikan, semakin besar kemungkinan negara memiliki pegawai yang terlatih. Kebijakan yang mendorong pendidikan sebagai syarat bagi jabatan pemerintahan membantu menciptakan aparatur yang lebih mengenal administrasi modern (Indian Culture Portal, 2019). Dampaknya, Kesultanan Bhopal dapat mempertahankan stabilitas pemerintahan dalam situasi ketika negara-negara kerajaan India semakin terikat pada kekuasaan kolonial Inggris.

b. Dampak terhadap Kehidupan Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, dampak kebijakan Shah Jahan Begum tampak pada menguatnya peran Islam dalam kehidupan publik Bhopal. *Taj-ul-Iqbal* mencatat banyaknya masjid di Bhopal serta perhatian negara terhadap tokoh keilmuan dan pejabat yang cakap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan keagamaan dan keilmuan berkembang sebagai bagian dari tata kelola kesultanan (Begum, 1876: 227-228).

Kehadiran masjid dan lembaga keilmuan memberikan dampak sosial bagi masyarakat Muslim. Masyarakat memperoleh sarana ibadah yang lebih banyak, sementara tokoh agama dan ilmuwan memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan publik. Shah Jahan Begum menyatakan bahwa pada masanya pengetahuan disebarluaskan dan agama yang benar diajarkan kepada masyarakat (Begum, 1876: 228). Dengan demikian, kebijakan keagamaan Shah Jahan Begum turut membentuk pola kehidupan keagamaan yang lebih terstruktur.

Namun, dampak kebijakan keagamaan juga menimbulkan tantangan. Hubungan antara istana, ulama, dan gerakan reformisme Islam kadang menimbulkan ketegangan

politik. Kajian mengenai Siddiq Hasan Khan menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan dan penerbitan pada masa itu tidak lepas dari dinamika kekuasaan serta pengawasan kolonial Artinya, kebijakan keagamaan Shah Jahan Begum memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga harus dikelola agar tidak melemahkan posisi kesultanan di hadapan Inggris.

c. Dampak terhadap Kehidupan Politik

Dalam bidang politik, dampak kebijakan Shah Jahan Begum tampak pada menguatnya stabilitas pemerintahan dan tertibnya administrasi Bhopal. *Taj-ul-Iqbal* mencatat pengakuannya sebagai penguasa pada 1868 serta penetapan Sultan Jahan Begum sebagai pewaris. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan berusaha menjaga kesinambungan dinasti sekaligus mengurangi ketidakpastian pergantian kekuasaan (Begum, 1876: 122-126).

Kehadiran pejabat Inggris dalam pelantikan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi Shah Jahan Begum tidak hanya bertumpu pada hak dinasti, tetapi juga pada pengakuan pemerintah kolonial. Hubungan dengan Inggris memberikan perlindungan bagi Bhopal, tetapi sekaligus membatasi ruang politik negara tersebut. Shah Jahan Begum memilih kebijakan loyalitas untuk menjaga keberlangsungan Bhopal, meskipun ia tetap berusaha memperbaiki kedudukan kesultanan melalui perubahan tata korespondensi resmi dengan pemerintah Inggris (Begum, 1876: 138, 172-173). Dampak politik lainnya tampak pada memperkuatnya kendali pemerintah atas pejabat daerah. Melalui kunjungan ke wilayah selatan, barat, dan timur Bhopal, Shah Jahan Begum menerima pengaduan rakyat, memeriksa pejabat, serta menindak suap dan pungutan yang tidak disahkan negara. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, tetapi sekaligus memperkuat pengawasan penguasa terhadap perantara kekuasaan di daerah.

Pembaruan peradilan juga menjadi dampak penting dalam bidang politik. Shah Jahan Begum mengatur batas kewenangan pejabat, menetapkan batas waktu penyelesaian perkara, dan mewajibkan laporan berkala dari kepala departemen. Langkah tersebut membuat administrasi lebih teratur dan mengurangi penumpukan perkara. Namun, karena pejabat administratif tetap menjalankan fungsi peradilan, pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kehakiman belum benar-benar terbentuk.

Dengan demikian, kebijakan politik Shah Jahan Begum memberikan manfaat bagi penguatan negara dan pelayanan masyarakat, tetapi tetap berjalan dalam batas-batas

pemerintahan monarki dan kekuasaan kolonial. Pemerintahannya memperkuat kapasitas Bhopal dalam mengelola wilayah, keuangan, dan pejabat, namun otonomi politiknya tetap bergantung pada hubungan yang dijaga dengan Inggris (Metcalf, 2011).

d. Dampak terhadap Pembangunan Kota dan Masyarakat

Kebijakan Shah Jahan Begum juga berdampak pada transformasi fisik dan sosial Kota Bhopal. Dalam *Taj-ul-Iqbal*, ia menjelaskan bahwa pada masa pemerintahannya jalan-jalan diperlebar, rumah dan toko permanen dibangun di kedua sisi pasar, sementara pembangunan rumah dari tanah dilarang. Ia juga menyebut bahwa kemakmuran dan jumlah penduduk Bhopal terus meningkat. Pembangunan tersebut menunjukkan ambisi penguasa untuk menjadikan Bhopal sebagai ibu kota yang modern, tertata, dan representatif bagi kekuasaannya. Pembangunan kota mencakup jalan, bangunan publik, fasilitas pendidikan, dan arsitektur keagamaan. *Taj-ul-Iqbal* menyebut pembangunan sekolah, keberadaan banyak masjid, serta pembangunan sarana kota sebagai bagian dari perkembangan Bhopal (Begum, 1876; 227). Dampaknya, masyarakat memperoleh fasilitas publik yang lebih baik, sementara negara memperoleh citra sebagai kesultanan yang makmur dan teratur.

Selain pembangunan fisik, Shah Jahan Begum juga melakukan reformasi di bidang administrasi, pertanian, kehakiman, kepolisian, militer, kesehatan, pos, telegraf, dan pekerjaan umum. *The Times of India* mencatat bahwa ia memperkenalkan berbagai reformasi, termasuk bidang pendidikan perempuan, reformasi keagamaan, dan pekerjaan publik (The Times of India, 2003). Reformasi tersebut memperkuat kapasitas negara dalam melayani masyarakat. Bagi rakyat, kehadiran layanan publik yang lebih teratur berarti peningkatan akses terhadap keadilan, kesehatan, dan fasilitas dasar.

Dampak sosial dari kebijakan tersebut juga tampak pada membaiknya kualitas hidup sebagian masyarakat. Kajian Maitreyi menyebutkan bahwa Shah Jahan Begum berkontribusi pada perbaikan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan teknologi. Meskipun dampak ini kemungkinan lebih dirasakan oleh masyarakat kota dan kelompok elite dibandingkan masyarakat pedesaan, arah kebijakannya tetap menunjukkan pergeseran dari pemerintahan tradisional menuju pemerintahan yang lebih memperhatikan kesejahteraan publik.

e. Dampak terhadap Posisi Kesultanan Bhopal

Pada tingkat kesultanan, kebijakan Shah Jahan Begum memperkuat stabilitas dan citra Bhopal sebagai negara kerajaan Muslim yang mampu beradaptasi dengan zaman.

Taj-ul-Iqbal menempatkan pemerintahan Shah Jahan Begum sebagai kelanjutan dari tradisi penguasa perempuan Bhopal yang menjalankan administrasi secara cermat dan berwibawa (Lambert-Hurley, 2023). Dengan menonjolkan pendidikan, keagamaan, dan pembangunan, Shah Jahan Begum menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dapat menghasilkan tata kelola yang efektif.

Kebijakan pendidikan dan keagamaan juga membantu Bhopal mempertahankan identitasnya di tengah dominasi kolonial. Melalui sekolah, madrasah, dan masjid, Bhopal membangun infrastruktur budaya yang memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. *Taj-ul-Iqbal* sendiri merupakan bagian dari upaya tersebut karena karya ini menuliskan sejarah Bhopal dari sudut pandang penguasa dan menegaskan peran dinasti Begum dalam memajukan pendidikan. Royal Collection Trust menjelaskan bahwa para Begum Bhopal menulis karya dalam bahasa Urdu dan Persia sebagai bagian dari kampanye untuk kemajuan pendidikan di negaranya (Royal Collection Trust, 1999).

Namun, dampak kebijakan Shah Jahan Begum tidak sepenuhnya bebas dari keterbatasan. Pemerintahan Bhopal tetap berada dalam sistem politik kolonial, sehingga otonomi kesultanan bersifat terbatas. Kebijakan pendidikan dan keagamaan harus disesuaikan dengan kepentingan Inggris serta dinamika internal istana. Ketegangan antara Siddiq Hasan Khan dan pejabat kolonial Sir Lepel Griffin pada tahun 1880-an menunjukkan bahwa kebijakan keagamaan dan posisi perempuan dalam kekuasaan dapat menjadi sumber konflik politik.

Meskipun demikian, secara umum periode 1868-1901 merupakan masa penting dalam sejarah Bhopal. Shah Jahan Begum berhasil mengubah kesultanan menjadi pusat pendidikan, keagamaan, dan pembangunan kota. Dampak kebijakannya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui bertambahnya sekolah, fasilitas keagamaan, sarana publik, dan pembangunan kota. Pada saat yang sama, kesultanan memperoleh legitimasi politik dan budaya yang lebih kuat.

Dengan demikian, *Taj-ul-Iqbal* menunjukkan bahwa kebijakan Shah Jahan Begum bukan hanya kebijakan administratif, melainkan proyek peradaban. Ia berusaha membangun masyarakat yang berilmu, saleh, tertib, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dampaknya menjadikan Bhopal salah satu contoh penting negara kerajaan Muslim di India kolonial yang mampu menggabungkan tradisi Islam, kepemimpinan perempuan, dan modernisasi administratif (Begum, 1876: 224).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi pemerintahan dan kehidupan sosial-politik Bhopal pada masa Shah Jahan Begum tahun 1868-1901 M berada dalam situasi peralihan yang dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial Inggris. Shah Jahan menjalankan pemerintahan sebagai penguasa perempuan Muslim dengan otonomi internal yang relatif terjaga, tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan perlindungan politik pemerintah kolonial. Kehidupan sosial-politik Bhopal pada masa itu juga ditandai oleh dinamika hubungan antara istana, tokoh keagamaan, keluarga kerajaan, dan pejabat kolonial.

Kebijakan Shah Jahan Begum dalam bidang pendidikan dan keagamaan sebagaimana tergambarkan dalam *Taj-ul-Iqbal* menunjukkan orientasi pembaruan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Shah Jahan mendorong perluasan akses pendidikan, khususnya bagi perempuan, melalui pendirian dan pengembangan institusi pendidikan. Dalam bidang keagamaan, ia menunjukkan perhatian terhadap kehidupan keagamaan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan dan pembangunan keagamaan. Kebijakan tersebut mencerminkan posisi Shah Jahan sebagai penguasa yang memanfaatkan kewenangannya untuk membuka peluang sosial bagi masyarakat Bhopal.

Dampak kebijakan Shah Jahan Begum terhadap perkembangan masyarakat dan Kesultanan Bhopal tampak pada meluasnya akses pendidikan serta menguatnya kehidupan keagamaan masyarakat. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pembentukan ruang keberdayaan perempuan, terutama melalui pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial. Pada tingkat kesultanan, kebijakan Shah Jahan memperkuat citra Bhopal sebagai wilayah Muslim yang mampu menjalankan reformasi sosial dan keagamaan di tengah tekanan kolonial. Dengan demikian, pemerintahan Shah Jahan Begum menunjukkan bahwa seorang penguasa perempuan Muslim mampu menjalankan peran politik sekaligus mendorong perubahan sosial melalui kebijakan pendidikan dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Begum, S. (1876). *The Tāj-ul Ikbāl Tārīkh Bhopal, or, The history of Bhopal* (H. C. Barstow, Trans.). Thacker, Spink.

Bhopal District Administration. (n.d.). *Taj-ul-Masajid* [Photograph]. https://bhopal.nic.in/en/tourist-place/taj-ul-masajid/

Bhopal District Administration. (2019). *Itihas [History]*. https://bhopal.nic.in/en/history/

Bourne & Shepherd. (c. 1872). *Portrait of Nawab Sultan Shah Jahan Begum (1838–1901), ruler of Bhopal* [Photograph]. British Library, Photo 127: *Album of cartes de visite portraits of Indian rulers and notables*.

Imp-art. (2026). *Taj-ul-Masajid, Bhopal: Built environments & structures*. https://imp-art.org/articles/taj-ul-masajid-bhopal/

Kavitha, K. M. (2026). Royal women in the Indian princely states (1885–1947). *All Subject Journal, 13*(3), 13348. https://www.allsubjectjournal.com/assets/archives/2026/vol13issue3/13348.pdf

Khan, S. M. (2000). *The Begums of Bhopal: A dynasty of women rulers in Raj India*. I. B. Tauris.

Lambert-Hurley, S. (1998). *Contesting seclusion: The political emergence of Muslim women in Bhopal, 1901–1930* [Doctoral dissertation, SOAS University of London]. SOAS Research Online. https://eprints.soas.ac.uk/

Lambert-Hurley, S. (2007). *Muslim women, reform and princely patronage: Nawab Sultan Jahan Begam of Bhopal*. Routledge.

Lambert-Hurley, S., Iyengar, R., & Ali, N. (2023). When history empowers: Recovering the life stories of the Begums of Bhopal for women's learning and gender equality. *History Workshop Journal, 96*(1), 134–152. https://doi.org/10.1093/hwj/dbad015

Metcalf, B. D. (2011). Islam and power in colonial India: The making and unmaking of a Muslim princess. *The American Historical Review, 116*(1), 1–30. https://doi.org/10.1086/ahr.116.1.1

Royal Collection Trust. (1999). *Taj al-Iqbal: Tarikh-e Bhopal ("The history of Bhopal")*. https://www.rct.uk/collection/publications/eastern-encounters/taj-al-iqbal-tarikh-e-bhopal-the-history-of-bhopal

Sight, A. (2020). *The resilient Begums of Bhopal* [Research paper]. Maitreyi College. https://www.maitreyi.ac.in/uploads/research/Samvedna/issues/vol2/issue2/engsection/E7.pdf

The Friday Times. (2014, September 5). *Sultan Shah Jahan, Begum of Bhopal (1872)*. https://www.thefridaytimes.com/05-Sep-2014/sultan-shah-jahan-begum-of-bhopal-1872

The Imperial Durbar album of the Indian princes, chiefs and zamindars. (1911). https://archive.org/stream/DurbarAlbum1/Durbar%20album%201_djvu.txt

The Times of India. (2003, August 10). *Iron lady of Bhopal*. https://timesofindia.indiatimes.com/iron-lady-of-bhopal/articleshow/94631.cms